



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN LAYANAN AKADEMIK
3. NHK : 956696

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 702 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD/MICRO/MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA ATI1121B01 A/T / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY C1C02N16M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY C1C02N46L0 A/T /SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N46L0 A/T /SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 591.000.000

III. HUTANG

Rp. 144.839.228

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 446.160.772

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.